

Keadilan Sosial di Dunia Maya: Penanaman Nilai dan Karakter Pancasila di Masyarakat dalam Menggunakan Media Sosial

Teguh Aris Munandar¹

Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
teguharis86@untirta.ac.id

Febri Saefulloh²

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha
febriprimagraha@gmail.com

Oki Pamungkas³

Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
eriko49.op@gmail.com

ABSTRACT

The rapid development of information technology in the era of globalization has significantly impacted various aspects of society, particularly in the use of social media and the internet. While easy access to information brings numerous benefits, it also presents serious challenges such as moral degradation, misuse of digital media, and low digital literacy among citizens, including students. This phenomenon poses a critical challenge for the field of education, especially Civic Education or Pancasila and Civic Education, which plays a strategic role in shaping character and national awareness in the digital era. This study employs a library research approach by analyzing various relevant literature sources to explore the role of Civic Education in fostering digitally literate, ethical, and Pancasila-based citizens. The findings suggest that Civic Education must actively integrate digital literacy, character education, and ethical media use into its learning process. By doing so, citizens can be well-prepared to face the dynamics of the digital age wisely and responsibly, while also preserving the national identity and cultural values rooted in Pancasila.

Keywords: Civic Education, Pancasila, Digital Literacy, Media Ethics, National Character

LATAR BELAKANG

Perkembangan pesat dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kemudahan akses terhadap informasi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya melalui media sosial. Akses yang semakin luas ini memang memberikan berbagai manfaat positif, namun tidak dapat dimungkiri pula bahwa kemajuan ini juga membawa dampak negatif yang signifikan terhadap nilai-nilai luhur bangsa, khususnya Pancasila. Salah satu dampak yang paling mencolok dari fenomena globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi adalah pergeseran perilaku warga negara yang cenderung mengarah pada sikap

individualistik. Sikap ini bertentangan secara fundamental dengan sila ketiga Pancasila yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan.

Globalisasi sebagai suatu proses integrasi internasional yang ditopang oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk budaya dan perilaku masyarakat. Pengaruh global ini tidak hanya bersifat sektoral, melainkan juga meluas secara menyeluruh ke berbagai dimensi kehidupan. Perubahan ini terjadi begitu cepat dan sering kali tanpa diiringi dengan kesiapan masyarakat dalam menyaring serta menyikapi nilai-nilai asing yang masuk. Akibatnya, nilai-nilai kebangsaan yang selama ini dijunjung tinggi berpotensi tergerus oleh budaya luar yang belum tentu sejalan dengan ideologi Pancasila.

Kehadiran internet sebagai salah satu produk utama IPTEK memberikan kemudahan dalam menjalin komunikasi tanpa batasan geografis. Di satu sisi, hal ini tentu merupakan kemajuan yang positif karena dapat mempercepat arus informasi dan memperluas jaringan sosial. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan persoalan baru, terutama ketika media sosial digunakan secara tidak bijak. Penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan etika komunikasi dan kesadaran moral dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial, termasuk penyebaran ujaran kebencian, hoaks, hingga polarisasi masyarakat.

Realitas yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda terjebak dalam penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Fenomena ini menjadi semakin mengkhawatirkan ketika data menunjukkan bahwa Indonesia sempat dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kesopanan netizen terendah di Asia Tenggara (Anonim, 2021). Predikat ini bukan sekadar label, melainkan mencerminkan adanya krisis nilai dan degradasi etika dalam kehidupan digital masyarakat. Hal ini dapat diartikan sebagai kegagalan dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di era digital, di mana sikap saling menghormati dan tenggang rasa seolah-olah mulai terabaikan. Fenomena ini semakin kompleks ketika kesenjangan literasi digital terjadi tidak hanya pada anak-anak dan remaja, tetapi juga pada orang dewasa, termasuk para orang tua yang sejatinya memiliki peran sentral dalam memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anak mereka.

Minimnya kesadaran akan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak sering kali bermuara pada lemahnya proses penyadaran, pencerdasan, dan sosialisasi mengenai etika bermedia (Prasetyaningrum et al., 2022). Ketika anak-anak di bawah umur sudah dibiarkan menggunakan media sosial tanpa pengawasan yang memadai, mereka rentan terpapar konten yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Ironisnya, banyak orang tua sendiri belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai seluk-beluk media sosial dan potensi dampaknya, baik secara positif maupun negatif. Ketidaktahuan ini menyebabkan munculnya celah yang semakin memperlebar jarak antara perkembangan teknologi dan kesiapan mental serta moral penggunaannya.

Kebiasaan baru yang terbentuk dalam masyarakat digital Indonesia juga menunjukkan lemahnya daya kritis dalam menyaring informasi. Masyarakat kerap kali dengan mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, yang pada akhirnya dapat menciptakan misinformasi dan disinformasi dalam skala luas. Seperti yang dikemukakan oleh Juditha (2018), budaya literasi digital yang lemah ini turut mendorong lahirnya sikap intoleran yang semakin menonjol di ruang-ruang diskusi publik digital. Media sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk berbagi informasi dan memperkuat jejaring sosial justru menjadi arena konflik, provokasi, dan polarisasi karena hilangnya kontrol terhadap etika dan moralitas dalam berkomunikasi (Razaqa et al., 2022).

Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah kebebasan yang absolut. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi haruslah disertai dengan kesadaran untuk tidak melanggar batas-batas yang dapat merugikan orang lain, baik secara emosional maupun sosial. Seperti dijelaskan oleh Pratama et al. (2022), konsep kebebasan dalam bermedia sosial perlu dimaknai secara kontekstual, yaitu sebagai ruang terbuka untuk mengekspresikan diri, namun tetap memperhitungkan hak dan martabat pihak lain. Tidak ada pembenaran atas perilaku yang merugikan atau menyakiti perasaan orang lain hanya karena mengatasnamakan kebebasan. Dalam konteks ini, nilai moral menjadi landasan utama yang harus dipegang teguh dalam setiap aktivitas digital (Adila et al., 2019), agar ruang maya dapat menjadi cerminan dari nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila.

Melanjutkan dari permasalahan etika dan moral dalam penggunaan media sosial, perlu disadari bahwa penyebaran informasi yang begitu masif pada era digital dewasa ini merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Perkembangan ini tentu memberikan berbagai peluang bagi warga negara untuk meningkatkan kualitas hidup, memperluas jaringan sosial, serta mempercepat proses pertukaran informasi. Namun, untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang tidak hanya menguasai aspek teknis, tetapi juga memiliki karakter dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Di era digitalisasi ini, warga negara dituntut untuk memiliki kecakapan digital (*digital literacy*) yang mumpuni, tidak hanya sebatas kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menyaring informasi, serta bertindak secara etis dan bertanggung jawab dalam ruang digital (Que & Najicha, 2024). Kecakapan tersebut menjadi pondasi dalam membentuk karakter warga negara yang adaptif, cerdas, dan berintegritas di tengah arus globalisasi yang begitu deras. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas bermedia, sebagai panduan normatif yang mampu mengarahkan perilaku warga negara agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa.

Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila—seperti sikap saling menghargai, gotong royong, keadilan, dan tanggung jawab

sosial—maka setiap individu dapat menggunakan media sosial dengan cara yang bijak dan beretika. Seperti yang dijelaskan oleh Que dan Najicha (2024), pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut bukan hanya memperkuat identitas kebangsaan, tetapi juga mampu menjadi tameng terhadap pengaruh negatif yang berpotensi merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Dalam praktiknya, hal ini tercermin dalam perilaku yang menghindari ujaran kebencian, tidak menyebarkan informasi palsu, serta mampu menunjukkan empati dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat.

Oleh karena itu, membangun karakter digital yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif sebagai warga negara dalam menjaga ruang publik digital yang sehat dan konstruktif. Tantangan di era teknologi bukan terletak pada kemampuan menguasai perangkat digital semata, tetapi bagaimana teknologi tersebut digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang telah lama menjadi bagian dari identitas Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penyusunan studi ini menggunakan pendekatan penelitian berbasis Studi Kepustakaan (Library Research), yang merupakan salah satu metode kualitatif dalam mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Studi kepustakaan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dari buku-buku teks semata, tetapi juga mencakup dokumen resmi, artikel ilmiah, jurnal, laporan penelitian, arsip, majalah, hingga kisah-kisah sejarah yang memiliki relevansi dengan isu yang diteliti (Cahyono, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan fondasi teoritik yang kuat serta wawasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang sedang dikaji.

Lebih lanjut, studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah secara mendalam berbagai literatur yang memuat konsep, teori, serta temuan-temuan terdahulu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sebagaimana dijelaskan oleh Mirzaqon (2017), kajian pustaka merupakan tahapan penting dalam proses penelitian ilmiah karena dapat memberikan kerangka pemahaman konseptual yang menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan secara sistematis. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian sebelumnya, menemukan relevansi antara teori dan praktik, serta merumuskan pendekatan yang tepat dalam meninjau permasalahan kontemporer yang terjadi di masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, metode studi kepustakaan digunakan sebagai strategi untuk mengeksplorasi bagaimana warga negara dapat menggunakan media sosial dan memanfaatkan teknologi digital secara bijak, khususnya melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermedia. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali berbagai perspektif akademik yang berkaitan dengan etika digital, literasi media, dan peran ideologi bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Oleh karena itu, kajian pustaka dalam penelitian ini bukan hanya sekadar rangkuman dari berbagai sumber, melainkan juga menjadi dasar analitis dalam

mengembangkan argumen dan sintesis yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis yang bermanfaat dalam mendorong penggunaan media sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan nilai-nilai luhur Pancasila.

PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara berkomunikasi, mencari informasi, hingga membentuk opini publik. Akses terhadap internet yang semakin luas dan terbuka memang memberikan kemudahan luar biasa, terutama dalam hal efisiensi waktu dan ruang. Masyarakat kini dapat memperoleh informasi dalam hitungan detik, menjalin interaksi sosial tanpa batas geografis, serta memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar dan bekerja. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan besar yang menyertai—yakni ketidaksiapan sebagian masyarakat dalam menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab.

Fenomena rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan remaja, menjadi peringatan serius akan pentingnya penguatan karakter dan pengawasan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak usia Sekolah Dasar, misalnya, kini tidak hanya akrab dengan perangkat digital, tetapi juga menunjukkan ketergantungan yang signifikan terhadap internet dan media sosial dalam kesehariannya. Situasi ini diperparah oleh kurangnya keterlibatan aktif orang tua dalam mendampingi anak-anak mereka, baik karena keterbatasan pengetahuan digital maupun karena pola pengasuhan yang permisif (Wismasari, 2021). Selain itu, penggunaan internet yang tidak dibatasi oleh umur atau tingkat kematangan kognitif menjadikan anak-anak rentan terhadap konten negatif, hoaks, serta paparan nilai-nilai yang bertentangan dengan karakter kebangsaan (Sbragaglia et al., 2021).

Mengingat kompleksitas tantangan digital tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila memiliki posisi strategis dalam membentuk generasi yang cerdas secara digital dan berkarakter kebangsaan. PKn tidak hanya bertugas menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga berperan dalam membina moralitas, etika sosial, serta tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks era digital, nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan ke dalam praktik kehidupan bermedia, seperti menumbuhkan rasa hormat terhadap sesama pengguna media sosial, membiasakan diri menyaring informasi sebelum membagikan, serta menghindari ujaran kebencian dan konten destruktif lainnya.

Pendidikan karakter berbasis Pancasila yang diterapkan dalam ruang digital dapat menjadi solusi preventif terhadap penyimpangan perilaku digital yang kini marak terjadi. Poin-poin dalam Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial dapat diinternalisasikan melalui proses pendidikan yang integratif dan

kontekstual, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat luas. Ketika warga negara memiliki pemahaman mendalam mengenai makna dari Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam konteks kehidupan digital, maka mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menjaga etika, moralitas, dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

Dengan demikian, pertanyaan reflektif mengenai “apakah Pancasila mampu bersaing dan bertahan di era society 4.0, bahkan 5.0?” dapat dijawab dengan optimisme yang rasional. Selama nilai-nilai luhur tersebut terus dihidupkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ruang digital, maka Pancasila akan tetap relevan sebagai ideologi yang adaptif, dinamis, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan substansi utamanya. Pancasila bukan hanya sekadar simbol ideologi, melainkan fondasi etis yang mampu menavigasi warga negara dalam menghadapi kompleksitas era digital secara bermartabat dan bertanggung jawab.

Arus globalisasi yang bergerak cepat telah membawa dampak besar terhadap dinamika kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu berkembang, berinteraksi, dan memperoleh informasi. Salah satu aspek paling menonjol dari fenomena ini adalah kemajuan teknologi informasi yang menandai transisi menuju era digital. Transformasi ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi, tetapi juga mendorong terjadinya ketergantungan masyarakat, khususnya warga negara, terhadap teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Oducado et al., 2019). Ketergantungan ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam dunia pendidikan, di mana pendidik tidak hanya dituntut untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengarahkan peserta didik agar mampu menggunakan teknologi tersebut secara etis dan bertanggung jawab (Maifianti et al., 2021).

Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki posisi yang sangat strategis dan esensial. Pendidikan ini tidak sekadar menyampaikan pengetahuan normatif tentang negara dan konstitusi, melainkan memiliki misi yang lebih luas yaitu menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaan yang relevan dalam kehidupan digital. Dengan memberikan pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara, pentingnya menghormati sesama, serta etika dalam berinteraksi sosial, PKn berfungsi sebagai medium pembinaan moral dan karakter di tengah derasnya arus informasi yang tanpa batas.

Salah satu kompetensi penting yang harus ditumbuhkan dalam pembelajaran PKn di era digital adalah *self-control* atau kemampuan mengendalikan diri. Hal ini menjadi semakin relevan ketika peserta didik dihadapkan pada tugas-tugas yang menuntut mereka untuk mencari informasi secara mandiri melalui internet. Di sinilah letak peran krusial guru sebagai fasilitator, bukan hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam membimbing peserta didik untuk memilah dan menyaring informasi, memahami etika berinternet, serta

mencegah penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan perilaku digital negatif lainnya (Que & Najicha, 2024).

Pendidikan Kewarganegaraan, dengan muatan nilai-nilai Pancasila di dalamnya, merupakan ruang ideal untuk proses internalisasi karakter. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip seperti gotong royong, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, serta semangat persatuan yang menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Pendidik memiliki tanggung jawab moral dan pedagogis untuk menjadikan PKn bukan sekadar mata pelajaran formal, melainkan wadah pembentukan kepribadian warga negara yang adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai luhur bangsa.

Dalam menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri 4.0, pendidikan karakter berbasis Pancasila tidak bisa lagi dianggap sebagai pelengkap, melainkan menjadi elemen utama dalam pembentukan generasi yang cakap secara teknologi dan matang secara moral. Tantangan ini tentu tidak ringan, mengingat kuatnya pengaruh budaya luar, individualisme, dan konsumsi informasi instan yang sering kali tidak disertai dengan proses kritis. Namun, dengan perencanaan pembelajaran yang berbasis nilai, pendekatan yang humanis, serta keteladanan dari para pendidik, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi benteng yang kokoh dalam menjaga integritas moral warga negara di tengah derasny arus digital.

Melanjutkan dari urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter warga negara yang beretika dan bertanggung jawab di era digital, maka relevansi dan kontribusi pendidikan ini menjadi semakin krusial di tengah tantangan zaman yang terus berkembang. Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memegang peran penting dalam mempersiapkan warga negara agar mampu menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam bersikap, khususnya dalam memanfaatkan ruang digital. Dalam konteks ini, pendidikan tersebut menjadi sarana strategis untuk menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, sekaligus membentuk warga negara yang adaptif dan berdaya saing tinggi.

Pendidikan ini secara fungsional diproyeksikan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya paham hak dan kewajibannya dalam dunia nyata, tetapi juga dalam dunia digital yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Kerr (1999a), Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam membekali peserta didik dengan kapasitas intelektual dan moral agar mereka mampu mengambil peran aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya berkuat pada aspek kognitif, melainkan juga menyentuh aspek afektif dan psikomotorik melalui pembiasaan sikap kritis, empatik, serta pemahaman akan etika digital. Di era abad ke-21

ini, di mana interaksi digital menjadi semakin intens, warga negara dituntut memiliki literasi digital yang kuat, termasuk kemampuan untuk menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab (Mcgillivray et al., 2015).

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan harus diarahkan tidak hanya sebagai pembelajaran normatif, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam pencerdasan digital. Edukasi mengenai etika, keamanan digital, literasi informasi, dan tanggung jawab sosial harus diintegrasikan secara komprehensif dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Hanya dengan cara itulah bangsa ini dapat mencetak generasi warga negara yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan moralitas dalam setiap langkahnya di era digital.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara warga negara berinteraksi dan berpartisipasi di ruang digital. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi serta membuka peluang untuk kemajuan di berbagai sektor. Namun, di sisi lain, kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyalahgunaan teknologi, ketergantungan terhadap media digital, serta menurunnya kesadaran etis dalam menggunakan media sosial, terutama di kalangan generasi muda.

Dalam konteks inilah, Pendidikan Kewarganegaraan atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen edukatif yang mampu membentuk karakter warga negara agar memiliki literasi digital yang baik, bertindak bijak, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan ini, peserta didik diarahkan untuk memahami makna kebebasan yang bertanggung jawab di ruang digital, serta dibekali dengan pemahaman mengenai etika, moralitas, dan kewarganegaraan yang berlandaskan nilai luhur bangsa.

Dengan penguatan peran Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan generasi muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang pasif, tetapi juga menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab, yang mampu berkontribusi secara konstruktif dalam membangun masyarakat digital yang beretika dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, I., Weda, W., & Tamitiadini, D. (2019). Pengembangan Model Literasi dan Informasi Berbasis Pancasila dalam Menangkal Hoaks. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18 (1).
- Anonim. (2021). Riset: Netizen di Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara. CNN Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-di-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara> pada 11 Mei 2021.

- Antari, P. E. D. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Undinas*, 4(1).
- Cahyono, A. D. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. *JIP: Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2 (2).
- Dewantara, J. A., Suhendar, I. F., Rosyid, R., Atmaja, T. S. *Pancasila as Ideology and Characteristics Civic Education in Indonesia. International Journal for Educational and Vocational Studies*, 1(5), 400–405. <https://doi.org/10.29103/ijevs.v1i5.1617>
- Juditha, C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Sosial media serta Antisipasinya Hoax Communication Interactivity in Social Media and Anticipation. In *Jurnal Pekommas* (Vol. 3, Issue 1).
- Kerr, D. (1999a). *Citizenship education: an international comparison*. National Foundation for Education Research (NFER).
- Maifianti, K. S., Hidayati, R., & Mauliansyah, F. (2021). Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial Kalangan Pelajar di SMAN Wira Bangsa Aceh Barat. *Community Development Journal*, 2 (2).
- Mirzaqon. T., A., & Purwoko, B. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8 (1).
- Oducado, R. M. F., Sales, M. R., Magarzo, A. J. P., Panes, P. M. A., & Lapastora, J. T. P. (2019). Perceptions and Attitude on Using Social Media Responsibly: Toward Social Media Literacy in Nursing Education. *Belitung Nursing Journal*, 5 (3).
- Pramanda, A. Y., Muchtarom, M., Hartanto, Rima V.P. Penguatan Etika Digital pada Siswa untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Paedagogia*, 21(2), 1–13. <https://10.20961/paedagogia.v21i2.23922>
- Prasetyaningrum, G., Nurmayanti, F., & Azahra, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Etika Sistem Informasi: Moral, Isu Sosial, dan Etika Masyarakat (Literature Review SIM). *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3 (2).
- Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (1).
- Que, B. I. A., & Najicha, F. U. (2024). Pancasila Sebagai Pilar Etika di Dunia Digital: Membangun Panduan Perilaku yang Bermartabat di Media Sosial. *Borneo: Law Review*, 8 (1).
- Rahmayanti, E. Penguatan Literasi Digital untuk Membentuk Karakter Kewarganegaraan Digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan. 79-86.

- Razaqa, M. K. (2022). Pengaruh Sosial media terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilu 2024. *Jurnal Pendidikan Transformatif*.
- Sbragaglia, V., Correia, R. A., & Di Minin, E. (2021). Responsible Use of Social Media Data is Needed: A Reply to Maya-Jariego et al. Plenty of Black Money: Netnography of Illegal Recreational Underwater Fishing in Southern Spain. *Marine Policy*, 134.
- Uzma, S., Syaharuddin, Mandailina, V., & Abdillah. (2024). Peran Media Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Matematika. *Mathematical Proceedings of the Widya Mandira Catholic University*, 2 (1).
- Wahyuni, E., & Fitria, Y. (2023). Media Digital dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Pembelajaran IPA Siswa Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8 (1).
- Wismasari, A. R. (2021). Pentingnya Pengawasan Orangtua terhadap Penggunaan Media Sosial Anak. *Kompasiana*. Diakses melalui <https://www.kompasiana.com/anisarahmahlia/60b6d6fed541df22f225b782/pentingnya-pengawasan-orang-tua-terhadap-penggunaan-media-sosial-pada-anak> pada tanggal 31 Mei 2025.